

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK (STUDI EVALUASI PROGRAM *ONE VILLAGE ONE PRODUCT* DI KABUPATEN PASURUAN)

Erick Hidayatullah Armanto

Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang

E-mail: Erickhidayatullah30@gmail.com

Salahudin S.IP, M.Si, M.P.A

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang

E-mail: udin.pemerintahan@gmail.com

Heru Mulyono S.IP, MT

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang

E-mail: ureh.mlg@gmail.com

Abstrak

Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan perekonomian pada sektor desa dengan cara mendirikan program-program unggulan terutama untuk desa yang dikategorikan “tertinggal”. Desa tertinggal adalah desa yang dimana berkebutuhan khusus antara lain: sarana dan prasarana yang kurang, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang minim, sumber daya manusia yang masih dibawah rata-rata. Hal tersebut harus diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia agar penanganan desa tertinggal segera terselesaikan. Seperti contohnya pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan cara mendirikan program desa maslahat yaitu program untuk desa tertinggal dengan berlandaskan pada konsep *One Village One Product* (Satu Desa untuk Satu Produk). *One Village One Product* (OVOP) dikenalkan pertama kali oleh Gubernur Morihiro Hiramatsu di negara Jepang di Kota Oita pada tahun 2001 dan masuknya OVOP di Negara Indonesia pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dicanangkan melalui Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2007 mengenai kebijakan percepatan pengembangan pada sektor riil dan pemberdayaan pada usaha mikro kecil dan menengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif yakni supaya penjelasan yang dipaparkan dalam tulisan ini tersampaikan dengan baik dan mudah di mengerti oleh pembaca. Adapun sumber data dalam penelitian kualitatif yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Lokasi penelitian dilakukan di BAPPEDA, Dinas Koperasi dan UMKM, Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program desa maslahat yang berlandaskan pada konsep *One Village One Product* (OVOP) di Kabupaten Pasuruan yang salah satunya Desa Jatirejo Kec. Lekok sebagai penghasil kerupuk ikan sudah berjalan dengan baik. Masyarakat Desa Jatirejo sangat antusias dalam menjalani kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan serta

dapat meningkatkan penjualan kerupuk ikan. Dalam pelaksanaan program desa masalah yang berada di Desa Jatirejo Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengevaluasi dalam waktu setiap tiga bulan sekali agar dapat mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi di Desa Jatirejo. Dan terdapat kendala dalam pelaksanaan program desa masalah di Desa Jatirejo terkadang lambatnya dalam masalah pendanaan yang terkadang memakai dana desa demi terselenggaranya program desa masalah, dan masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum paham tentang pelaksanaan program desa masalah. Dari temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa program desa masalah yang berlandaskan pada konsep *One Village One Product* (OVOP) di Desa Jatirejo berjalan dengan baik. Dalam mengevaluasi pelaksanaan program desa masalah dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Namun ada juga kendala dalam pelaksanaan program desa masalah yaitu: terkadang lambatnya masalah pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan, masih adanya masyarakat yang belum paham mengenai pelaksanaan program desa masalah.

Kata Kunci: *Kebijakan Publik, Evaluasi Kebijakan, Program One Village One Product (OVOP),*

Abstract

The Indonesian government to improve the economy in rural sector by setting up a flagship programs especially for villages that are categorized as "left behind". Backward villages are villages where special needs, among others: the lack of infrastructure, education and health facilities are minimal, human resources are still below average. It must be considered by the Government of Indonesia to tackling rural villages resolved immediately. As an example in Pasuruan regency government by establishing a village program beneficiaries are programs for underdeveloped villages, building on the concept of One Village One Product. One Village One Product (OVOP) was first introduced by Governor Morihiro Hiramatsu in Japan in the city of Oita in 2001 and the inclusion of OVOP in the State of Indonesia under President Susilo Bambang Yudhoyono and declared through Presidential Decree (Presidential Instruction) No. 6 of 2007 on the policy of acceleration the development of the real sector and the empowerment of small and medium micro enterprises. The method used in this study is a qualitative research method using descriptive research that is so explanations presented in this paper conveyed properly and easily understood by the reader. The source of the data in qualitative research is the source of primary data and secondary data sources. The research location is in BAPPEDA, Cooperatives and SMEs, Lekok Jatirejo Village District of Pasuruan. The results showed that beneficiaries village program that is based on the concept of One Village One Product (OVOP) in Pasuruan one Jatirejo Village district. Winding as a producer of fish crackers is already well underway. Village Community Jatirejo very enthusiastic in carrying out the activities provided by the Government of Pasuruan and increase sales of fish crackers. In the implementation of the village program beneficiaries in the village of Pasuruan District Government Jatirejo evaluate within every three months in order to determine the level of success and failure that occurred in the village of Jatirejo. And there are obstacles in the

implementation of program beneficiaries in the village village Jatirejo sometimes slow in funding issues which sometimes wear fund the implementation of village after village program beneficiaries, and there are still small percentage of people do not understand about the implementation of the country program beneficiaries. From the findings in the field can be concluded that the program beneficiaries village which is based on the concept of One Village One Product (OVOP) in the village of Jatirejo going well. In evaluating the implementation of the country program beneficiaries are carried out every three months. But there are also constraints in the implementation of rural beneficiaries, namely: sometimes slow pace of government funding issues Pasuruan, there are still people who do not understand on the implementation of rural beneficiaries.

Keywords: *Public Policy, Evaluation Policy, Program One Village One Product (OVOP).*

A. Pendahuluan

Saat ini keinginan pemerintah guna mewujudkan daerahnya maju dan berkualitas serta mensejahterakan rakyatnya dengan cara mendirikan program- program unggulan pada daerah tersebut terutama pada tingkat desa. Oleh karena itu pemerintahan desa seringkali menjadi pusat perhatian publik karena pada sektor desa mempunyai potensi-potensi unggulan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat desa (Sulistyaningsih, T., Negara, P. D., & Hardini, H. K. (2016). PENGEMBANGAN DESA WISATA AGRO BERBASIS BUAH TROPIS DI KOTA BATU JAWA TIMUR. *Research Report*, 652-660). Namun masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan tidak tahu akan unggulan yang berada pada desa tersebut. Maka dari itu untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di pedesaan pemerintah harus turun tangan untuk memakmurkan kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan guna menggali potensi pada desa.

Mengenai Kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah yaitu program “*One Village One Product*” (OVOP) sudah berjalan efektif. Dampak positif dari program OVOP dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan mendorong sektor ekonomi andalan (pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata). Pengertian dari kebijakan publik itu sendiri merupakan serangkaian aktivitas atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Kebijakan publik memang tidak hadir dengan secara konkret di depan kita secara fisik seperti halnya kita melihat, memotret, dan meraba benda-benda yang ada disekitar kita, entah itu berupa bahan pangan dalam segala jenis buku-buku bahan ajar, mobil atau gedung perkantoran bertingkat.

Mengenai kebijakan publik merupakan hal yang berkesinambungan dalam kehidupan

pemerintah dan rakyat. Namun keinginan pemerintah guna mewujudkan pada tingkat pertumbuhan ekonomi pada desa mengenai *One Village One Product* (OVOP) merupakan suatu kebijakan yang dapat dinilai efektif dan efisien. Triharini (2014) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia melaksanakan program *One Village One Product* (OVOP) sebagai salah satu upaya untuk memajukan potensi industri kecil dan menengah kerajinan di daerah. Memajukan potensi produk kerajinan tidak hanya bertujuan untuk memajukan perekonomian pengrajinnya, tetapi juga melestarikan nilai-nilai tradisional yang dikandung dalam produk, seperti keahlian yang diturunkan dari generasi ke generasi. Penerapan OVOP dalam rangka memajukan industri kerajinan memerlukan adanya strategi khusus yang sesuai dengan prinsip mendasar OVOP dan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh industri kerajinan.

Asriati (2015) menunjukkan bahwa penerapan model OVOP dengan *Quality Function Deployment* (QFD) belum seratus persen berhasil karena belum banyak memiliki jaringan nasional maupun Internasional. Upaya pengembangan produk OVOP sudah dilakukan berupa: Pelatihan, Pendampingan tenaga ahli, Bantuan sarana usaha, Promosi dan Pameran, Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Fasilitasi Permodalan, dan Pemberian penghargaan OVOP. Pengembangan sentra produk OVOP dengan 50 jenis produk sangat mendukung terwujudnya Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) karena mampu menggali potensial daerah Rasau Jaya. Terbentuknya KTM akan menumbuhkan mindset atau perilaku pengusaha transmigrasi Rasau Jaya yang selalu ingin mengembangkan daerahnya melalui penggalian potensi kearifan lokal dengan mengembangkan *One Village One Product* (OVOP).

Mawardi (2015) mengatakan dengan adanya implementasi kebijakan OVOP dalam menguatkan daya saing pada sektor kerajinan rebana di Kabupaten Gresik sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan program-program strategis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan akan tetapi belum adanya peraturan Khusus atau Peraturan daerah dalam pengembangan OVOP di Kabupaten Gresik.

Cahyani (2013) Pengembangan UMKM dengan pendekatan OVOP bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pembinaan secara terintegrasi dari para *stakeholder*. Diharapkan gerakan ini secara cepat menumbuhkembangkan berbagai potensi sumberdaya dan kearifan lokal daerah menjadi produk bernilai tambah tinggi, yang mampu bersaing dan mampu memasuki pasar global.

Indah Pratiwi (2016) mengatakan dengan adanya program *One Village One Product*

(OVOP) di Desa Pelaga merupakan program yang dilaksanakan untuk memberdayakan petani dengan pola OVOP melalui wadah koperasi. Dasar pelaksanaan program ini adalah Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 yang mengintruksi kebijakan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. Program ovop di Desa Pelaga sudah berjalan dengan baik.

Hal tersebut dapat terlihat dari sisi konteks yang menunjukkan bahwa tujuan program ini sesuai dengan keadaan yang diperlukan pada Desa Pelaga dengan melihat kondisi lingkungan dan komitmen pemerintah serta mempertimbangan kekuatan dan kelemahan sasaran program. Dari sisi input, hasil analisis menunjukkan sumber daya manusia yang ada masih memerlukan pembinaan berkelanjutan, sedangkan anggaran yang diperoleh telah tercukupi begitu pula dengan fasilitas- fasilitas pendukung yang ada sudah memadai dan mendukung pelaksanaan program ini.

Berdasarkan temuan diatas dapat disimpulkan bahwa "*One Village One Product*" merupakan sebuah konsep yang sangat simple dan kreatif. Karena pada konsep ini sebuah daerah/desa bisa menggunakan potensi yang ada di daerahnya tersebut. Hal ini dapat menunjang pertumbuhan ekonomi terutama dalam bidang agrobisnis. Pemerintah daerah saat ini menyoroti daerah tertinggal guna untuk menerapkan program OVOP (*One Village One Product*) karena pada konsep ini dapat mengetahui potensi- potensi yang ada pada masing-masing daerah/desa. Program ovop sebagai salah satu upaya untuk memajukan potensi industri kecil dan menengah kerajinan di daerah. Memajukan potensi produk kerajinan tidak hanya bertujuan untuk memajukan perekonomian pengrajinnya, tetapi juga melestarikan nilai-nilai tradisional yang dikandung dalam produk, seperti keahlian yang diturunkan dari generasi ke generasi.

Meskipun OVOP memiliki tujuan yang mulia namun pelaksanaannya masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Sebagaimana temuan Cahyani (2013) diatas, kelemahan pelaksanaan OVOP adalah lemahnya koordinasi antar *stakeholders*, kurangnya kesadaran masyarakat akan potensi ekonomi yang ada di daerahnya, serta kurang memadainya dukungan dana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Sakdiyah (2015) menegaskan bahwa, pendekatan *one village one product* belum mencapai seratus persen berhasil karena dari kriteria penilaian belum terpenuhi, produksi batik tulis Desa Klampar Kecamatan Proppo Pamekasan menunjukan desain-desain batik tulis Madura seperti (carsena, sisik malaya dan sebagainya). Dan tetap patuh kepada aturan atau pakem walaupun sebagian besar mengembangkan motif gambar-gambar dengan kreasi baru, sejalan dengan permintaan pasar yang dinamis. Upaya

pengembangan produk ovop belum dilakukan secara maksimal seperti pelatihan, pendampingan oleh tenaga ahli, promosi dan pameran, fasilitas HKI dan sebagainya. Lemahnya kinerja pemasaran diakibatkan karena belum maksimalnya para pengrajin batik dalam menciptakan nilai pelanggan.

One Village One Product di Indonesia adalah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Selanjutnya berlandaskan pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengamanatkan pengembangan sentra melalui pendekatan *One Village One Product*. Pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor: 78/M-IND/PER/9/2007 tentang Peningkatan Efektivitas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (*One Village One Product*) di sentra.

One Village One Product di Indonesia umumnya adalah UKM (Usaha Kecil Menengah) yang konsisten menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan terus mendapat bimbingan serta aneka bantuan dari pemerintah. Hal ini berkaitan dengan produk yang dihasilkan mewakili identitas daerah bahkan negara. Dimana produk-produknya mencerminkan keunikan suatu daerah atau desa. Dengan keunggulan yang dimiliki maka produk tersebut dapat meningkatkan pendapatan bagi daerahnya. Melalui kunjungan turis, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan ketrampilan sumber daya manusia (SDM).

Pada tahun 2014 Pemerintah, Kabupaten Pasuruan mencanangkan program inovasi berupa “Desa Maslahat” Program Desa Maslahat bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tertinggal dengan memaksimalkan potensidesa tersebut. Dengan berlandaskan pada konsep “*One Village One Product*” dasar pelaksanaan program desa maslahat dengan memaksimalkan potensi desa dan memprioritaskan satu produk unggulannya. Terdapat 24 desa dari 24 kecamatan di kabupaten Pasuruan yang ditetapkan menjadi Desa Maslahat berdasarkan keluar Peraturan Bupati Pasuruan nomor 9 tahun 2016 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program Desa Maslahat. Keputusan Bupati Pasuruan (Nomor:400/670/HK/424.013/2014) tentang Penetapan Lokasi Program Desa Maslahat Kabupaten Pasuruan (<http://www.forumdemokrasi.com/program-desa-maslahat-kabupaten-pasuruan-dukung-program-one-village-one-product/>).

Terdiri dari 24 Desa dari 24 Kecamatan di kabupaten Pasuruan yang telah terpilih untuk dijadikan program desa maslahat. Salah satunya yaitu desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan yang terpilih dijadikan program desa maslahat karena mempunyai

keunggulan yakni desa Jatirejo terletak dikawasan pesisir masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Pasuruan memilih desa Jatirejo sebagai desa yang memiliki potensi unggulan yaitu sebagai penghasil krupuk ikan.

Produk unggulannya guna dijadikan keberhasilan dari program desa maslahat. Program Desa Maslahat ini sangat didukung oleh masyarakat karena dengan adanya Satu Desa Satu Produk (*One Village One Product*) bisa meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya di desa tertinggal yang menjadi subyek program tersebut. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program desa maslahat, pemerintah kabupaten Pasuruan telah memperbaharui peraturan Bupati nomor 25 tahun 2014 menjadi nomor 9 tahun 2016 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program desa maslahat.

Implementasi program *one village one product* (OVOP) di Kabupaten Pasuruan juga dinilai gagal seperti yang terjadi di daerah-daerah lain. Tapi tidak semua penerapan OVOP dapat terbilang gagal seperti yang dikatakan oleh Junaidi (2011) bahwasanya gerakan OVOP di Kota Bengkulu diciptakan dan ditujukan untuk mengembangkan jeruk kalamansi sebagai produk unggulan dalam rangka membangun kompetensi inti daerah. Peluncuran gerakan OVOP di Kota Bengkulu menandai dimulainya babak baru membangun kota dengan metode dan strategi serta prinsip sebagaimana menjalankan gerakan OVOP di negara-negara yang mengadopsi OVOP. Jeruk kalamansi dipilih sebagai produk unggulan dengan pertimbangan produk ini memiliki keunikan. Mudah diusahakan oleh masyarakat lokal pada skala usaha rumah tangga serta terbukti mampu menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantitatif (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi, organisasi, aktivis, sosial, dan lain-lain. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan (Rahmat, 2009:8).

C. Tinjauan Pustaka

1. Kebijakan Publik

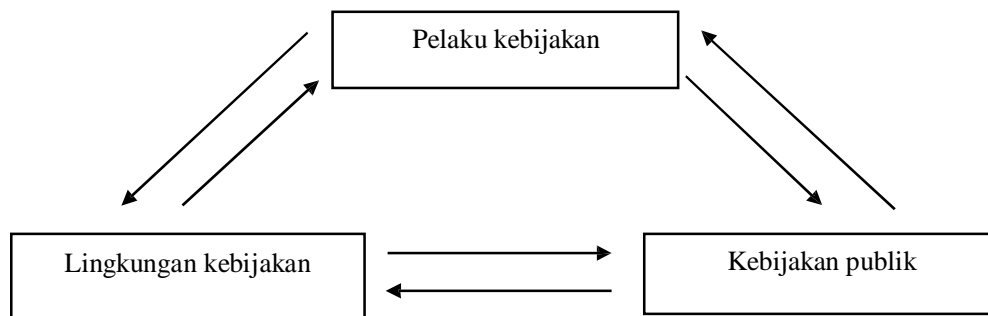
Banyak ahli memberikan definisi yang berbeda tentang kebijakan publik.

Dengan demikian, semuanya memiliki kesamaan fokus. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang para ahli dalam mendefinisikan Kebijakan Publik. Menurut Mujarwanto (2015:16) menjelaskan bahwa, “Kebijakan publik merupakan suatu daftar pilihan tindakan saling berhubungan yang disusun oleh institusi atau pejabat pemerintahan, artinya disini pusat dari adanya suatu kebijakan adalah mengenai dan terpusat pada tatanan pemerintah. Segala bentuk kebijakan merupakan keputusan kolektif dari pemerintah”. Menurut pakar Inggris, W.I. Jenkins dalam Wahab (2015:15) merumuskan kebijakan publik sebagai berikut, kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Dari kedua definisi diatas bahwasanya kebijakan publik merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Sebagai contohnya yaitu undang-undang anti korupsi, akan tetapi fenomena korupsi ternyata bukannya malah membaik melainkan makin menjadi. Dalam hal ini dapat mengibaratkan bahwa ada undang-undang tidak menjadi genap, tanpa adanya undang-undang pun tidak lantas membuat ganjil. Itulah sebabnya cukup beralasan bahwa jika kita tidak menganggap keinginan pemerintah betapapun bagus, sebagai sebuah kebijakan apabila kemudian ternyata tidak disertai dengan tindakan-tindakan tegas dan konkret untuk mengimplementasikannya.

Dalam teori sistem yang dikemukakan oleh Dunn, mengatakan bahwa dalam pembuatan kebijakan publik melibatkan tiga elemen yaitu pelaku kebijakan, kebijakan publik dan lingkungan kebijakan.

Gambar: 2.1
Hubungan tiga elemen sistem kebijakan



Sumber: dalam Subarsono (2006:15)

Dari gambar pembuatan kebijakan publik melibatkan tiga elemen yaitu pelaku kebijakan, kebijakan publik dan lingkungan kebijakan yang semuanya saling berhubungan dan terkait. Ketiga elemen ini saling memiliki peran dan saling mempengaruhi sebagai contoh pelaku kebijakan dapat mempunyai peran dalam kebijakan, namun mereka juga dapat dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri.

2. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi ditujukan guna untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik untuk dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Dan sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauh mana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut James Anderson dalam Winarno (2008:166) menjelaskan, secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

3. *One Village One Product*

Konsep *One Village One Product* (OVOP) sejak tahun 2006 mulai dipelajari dan diadopsi oleh berbagai negara, khususnya di Asia. OVOP diterapkan pada umumnya untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi antara desa dan kota di negara-negara Asia (Triharini, 2014: 33). Implementasi konsep *One Village One Product* (OVOP) diharapkan dapat menghindari terjadinya persaingan tidak sehat di antara desa-desa bertetangga karena setiap desa dapat mengembangkan produk unggulan yang saling berbeda. Mereka dapat mengisi pasar yang sama tanpa harus bersaing secara langsung (Ratmono,

2016:84). Konsep OVOP pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari program pengembangan potensi daerah yaitu satu desa untuk satu produk. Dengan adanya program OVOP ini diharapkan produknya yang menarik dari negara-negara berkembang.

4. Program Desa Masalahat

Pemerintah kabupaten Pasuruan telah menyiptakan sebuah program inovasi yang dimana program tersebut untuk desa tertinggal. Program desa tertinggal yaitu Desa Masalahat program tersebut telah diresmikan pada tahun 2014 dengan meningkatkan potensi yang ada pada desa tertinggal. Dampak dari adanya program desa masalahat untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih maju, merubah taraf hidup masyarakat (pendidikan, sosial dan budaya). Terdiri 24 desa dari 24 kecamatan telah terpilih sebagai desa masalahat berdasarkan keputusan Bupati Pasuruan (Nomor: 400/670/HK/424/013/2014) tentang penetapan lokasi Program desa masalahat (Syawaludin, 2016). Desa yang terpilih menjadi program desa masalahat akan difokuskan terhadap potensi keunggulannya guna untuk dijadikan *branding* produk (produk unggulan) untuk keberhasilan program desa masalahat.

Konsep *one village one product*(OVOP) yaitu satu desa satu produk merupakan dasar pelaksanaan program desa masalahat dengan memaksimalkan potensi desa dan memprioritaskan satu produk unggulannya. Misalnya dari beberapa desa yang terpilih menjadi Desa Masalahat Desa Jatiarjo Kec.Prigen sebagai desa wisata, Desa Wonorejo Kec. Lumbang penghasil olahan susu (peternakan), Desa Wonosari Kec. Gondang wetan dengan beras BUMDes beras organik, Desa Kalipucang Kec. Tukur sebagai produksi kopi dan Desa Jatirejo Kec. Lekok sebagai penghasil kerupuk ikan (Sukma, 2016).

D. Hasil dan Pembahasan

1. Eksistensi Program OVOP bagi pembangunan Desa di Kabupaten Pasuruan

Desa tertinggal merupakan desa yang jauh dari kata "*modern*", karena banyak sekali ketertinggalan pada sektor desa. Perlu dicanangkan program untuk meningkatkan desa tertinggal menjadi desa tidak tertinggal salah satunya dengan cara memanfaatkan potensi atau sumber daya alam yang berada didesa. Pemanfaatan potensi pada tingkat desa tidak bisa dilakukan masyarakat sendiri, keterlibatan pemerintah juga perlu untuk meningkatkan desa tertinggal dengan cara memberikan pelatihan, pendampingan khusus,

cara penanaman modal, dan sosialisasi. Pemerintah harus mempunyai program inovasi untuk desa tertinggal supaya dapat diakui oleh masyarakat agar persepsi dari pihak desa dan masyarakat tidak abal-abal mengenai program yang dibuat oleh pemerintah.

Dalam merubah desa tertinggal pemerintah Kabupaten Pasuruan mempunyai program unggulan yaitu program desa maslahat. Program desa maslahat merupakan program untuk membuat perubahan pada masyarakat desa tertinggal yang berada di Kabupaten Pasuruan untuk memberantas kemiskinan, pendidikan, budaya, dan meningkatkan ekonomi pada masyarakat. Didirikan pada tahun 2014 program desa maslahat yang berlandaskan pada konsep *One Village One Product* (OVOP) artinya satu desa satu produk. Berdasarkan Peraturan Bupati No. 9 tahun 2016 tentang Program Desa Maslahat dan keputusan Bupati Pasuruan (Nomor: 400/670/HK/424.013/2014) tentang penetapan lokasi program desa maslahat, terdapat 24 desa dari 24 kecamatan yang terkena imbas program desa maslahat. Beberapa desa akan difokuskan pengembangan potensinya sehingga dapat menjadi *branding* produk keberhasilan program desa maslahat.

Berdasarkan pendampingan untuk desa Jatirejo kecamatan Lekok Kab. Pasuruan sebagai penghasil kerupuk ikan, adapun pendampingan kepada desa-desa lainnya yang terkena imbas dari program desa maslahat seperti, Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen sebagai desa wisata, Desa Wonorejo Kecamatan Lumbang sebagai penghasil olahan susu (peternakan), Desa Wonosari Kecamatan Gondangwetan dengan BUMDes beras organik, Desa Kalipucang Kecamatan Tukur sebagai produksi kopi. Dalam mengimplementasi program desa maslahat di Desa Jatirejo berlandaskan konsep OVOP dilaksanakan dengan sinergitas program atau kegiatan SKPD, pemerintah desa dan masyarakat untuk kemudian diarahkan untuk fokus dalam memaksimalkan produk unggulan dari desa yang telah terpilih menjadi program desa maslahat.

2. Kebijakan Pendukung Program OVOP di Kabupaten Pasuruan

Kabupaten Pasuruan mempunyai program inovasi dalam mengentaskan desa tertinggal yaitu program desa maslahat. Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 6 Tahun 2014 yang telah diperbaharui Nomor 9 Tahun 2016 tentang program desa maslahat. Program desa maslahat bertujuan untuk menunjang perekonomian pada tingkat desa dengan konsep *One Village One Product* (OVOP), pada tahun 2014 program desa maslahat sudah berjalan dengan maksimal sesuai dengan mekanisme dari pemerintah Kabupaten Pasuruan. Targetnya ada evaluasi sekaligus pemetaan kegiatan penunjang

program yang siap direalisasikan secara kontinyu dan terukur, *outputnya* meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tertinggal dengan memaksimalkan potensi desa. Terdapat 24 desa dari 24 kecamatan khususnya didesa Jatirejo Kec. Lekok Kab. Pasuruan yang siap untuk dijadikan program desa masalahat dengan berdasarkan Keputusan Bupati Pasuruan (Nomor:400/670/HK/424.013/2014) tentang penetapan lokasi program desa masalahat.

3. Proses Pelaksanaan Program OVOP di Kabupaten Pasuruan

Dalam proses pelaksanaan program desa masalahat dengan berlandaskan konsep *One Village One Product* (OVOP), maka terlebih dahulu dilaksanakan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program desa masalahat di Kabupaten Pasuruan. Teknis pelaksanaan program desa masalahat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan desa masalahat di Kabupaten Pasuruan. Mengenai cakupan yang ada dalam teknis pelaksanaan terdapat monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan tujuan pelaksanaan program desa masalahat. Pada proses pelaksanaan program desa masalahat yang berlandaskan konsep OVOP sudah sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Didalam proses pelaksanaan yang terjadi dilapangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan program desa masalahat dibantu oleh Tim P3DM (Percepatan Pelaksanaan Program Desa Masalahat). Teknis pelaksanaan program desa masalahat meliputi pengawasan/monitoring dan evaluasi yang diadakan setiap tiga bulan sekali untuk mencapai tingkat keberhasilan atau kegagalan yang berada di desa.

4. Pengawasan dan Pertanggungjawaban Program OVOP di Kabupaten Pasuruan

Mengenai pengawasan dan pertanggungjawaban program desa masalahat berlandaskan konsep OVOP kedepannya yang berada didesa Jatirejo dan desa-desa lainnya yang terkena imbas dari program desa masalahat agar lebih baik lagi. Pengawasan dan pertanggung jawaban di koordinir oleh Bappeda selebihnya dilimpahkan kepada OPD terkait. Bappeda sebagai penanggung jawab atas terlaksananya program desa masalahat.

5. Evaluasi Program OVOP di Kabupaten Pasuruan

Pada tahap evaluasi program desa masalahat yang berlandaskan pada konsep *One Village One Product* (OVOP) di Kabupaten Pasuruan, untuk mengetahui perkembangan program desa masalahat perlu mengadakan evaluasi, guna melihat persentase keberhasilan dan kegagalan yang berada dilapangan. Evaluasi dilaksanakan setiap tiga bulan sekali guna

melaporkan capaian-capaian dan kendala apa saja yang berada di desa jatirejo dengan cara semua dinas yang terlibat didalam program dikumpulkan diruang rapat bappeda untuk menunjukkan persentase keberhasilan dan kegagalan dari program desa masalah yang telah dilaksanakan, serta hasil kinerja dari tim dan dinas yang terkait dalam pelaksanaan program desa masalah.

6. Dampak Program OVOP di Kabupaten Pasuruan

Program desa masalah memberikan pengaruh besar terhadap desa tertinggal di Kabupaten Pasuruan yang salah satu contohnya desa Jatirejo Kec. Lekok Kab. Pasuruan. Untuk menunjang perekonomian desa Jatirejo, program desa masalah memberikan wawasan dan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat desa Jatirejo. memberikan peningkatan perekonomian terhadap masyarakat desa Jatirejo menjadi lebih baik dari sebelumnya. Serta meningkatnya penjualan kerupuk ikan sekitar 20 kiloan dengan harga penjualan yaitu satu kilonya 25 ribu rupiah.

7. Kendala Program OVOP di Kabupaten Pasuruan

Pada pelaksanaan program desa masalah yang berlandaskan pada konsep *One Village One Product* (OVOP) yang berada di Desa Jatirejo terdapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu ketidaksinergisan antara pihak Desa Jatirejo dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan terkait dengan masalah pendanaan yang sering terlambat sehingga pihak desa terkadang mendanai sendiri dengan menggunakan dana desa agar pelaksanaan program desa masalah dapat berjalan dengan baik, masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang kurang mengerti tentang pelaksanaan program desa masalah.

E. Diskusi Hasil

Pemerintah Kabupaten Pasuruan memilih Desa Jatirejo karena memiliki kriteria program desa masalah antara lain sarana dan prasarana yang kurang, masih ada masyarakat yang pengangguran, tingkat pendidikan yang kurang, dan terdapat potensi yang bisa dikembangkan di Desa Jatirejo. Sehingga faktor-faktor tersebut yang menjadikan Desa Jatirejo terpilih menjadi program desa masalah yang berlandaskan pada konsep OVOP. Mayoritas masyarakat Jatirejo bermata pencaharian sebagai nelayan karena bertempat tinggal ditepi pantai. Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah membagi tugas dan fungsi kepada instansi yang berada di Pemerintah Kabupaten Pasuruan yaitu Bappeda sebagai penanggungjawab program desa masalah dan Dinas-

dinas yang terkait melakukan pelatihan-pelatihan kerja yang dibantu oleh Tim P3DM (Pelaksanaan Percepatan Program Desa Maslahat). Sebelum pelaksanaan program desa maslahat yang berada didesa salah satunya Desa Jatirejo Pemerintah Kabupaten Pasuruan melakukan sosialisasi terlebih dahulu agar masyarakat dapat mengetahui dan berpartisipasi untuk terselenggaranya program desa maslahat.

Dalam temuan Triharini (2014) di Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta menjelaskan bahwa, pemerintah Indonesia melaksanakan program *One Village One Product* (OVOP) sebagai salah satu upaya untuk memajukan potensi industri kecil dan menengah kerajinan didaerah. Dan memajukan potensi produk kerajinan tidak hanya bertujuan untuk memajukan perekonomian pengrajinnya tetapi melestarikan nilai-nilai tradisional. Artinya bahwa, program *One Village One Product* (OVOP) selain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat juga dapat melestarikan peninggalan yang bersifat tradisional seperti keahlian pengrajin gerabah dari generasi ke generasi.

Program desa maslahat yang berlandaskan pada konsep OVOP dapat meningkatkan perekonomian pada masyarakat Desa Jatirejo dengan memaksimalkan potensi yang berada didesa Jatirejo yaitu penghasil kerupuk ikan dan terdapat industri rumahan penghasil kerupuk ikan. Dengan terbantunya program desa maslahat berlandaskan konsep OVOP dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan maka dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Jatirejo dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, dan secara tidak langsung masyarakat Jatirejo melestarikan nilai tradisional dari generasi ke generasi sebagai penghasil kerupuk ikan.

Dari Jurnal diatas dan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Jatirejo menjelaskan bahwa program *One Village One Product* (OVOP) yang berada di Desa Jatirejo dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara memaksimalkan potensi yang berada di Desa Jatirejo sebagai penghasil kerupuk ikan, dan disisi lain dapat melestarikan nilai-nilai tradisional. Dan yang berada di Kecamatan Plered sebagai penghasil gerabah dalam jurnal Triharini, terdapat persamaan bahwa program OVOP dapat meningkatkan perekonomian pada masyarakat tetapi juga dapat melestarikan nilai-nilai tradisional dan mewarisi keahlian secara turun temurun/dari generasi ke generasi. Dari temuan diatas tidak ada perbedaan yang berada di Desa Jatirejo dan Kecamatan Plered keduanya sama-sama mengalami peningkatan dari segi ekonomi, serta dapat melestarikan nilai-nilai tradisional.

Dan yang selanjutnya yaitu hasil temuan dari Mawardi, Mengatakan

dengan adanya implementasi kebijakan OVOP dalam menguatkan daya saing pada sektor kerajinan rebana di Kabupaten Gresik sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan program- program strategis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan. Akan tetapi belum adanya peraturan khusus atau peraturan daerah dalam pengembangan OVOP di Kabupaten Gresik. Dari temuan diatas bahwa dapat disimpulkan untuk mendukung dalam penyelenggaraan program OVOP di Kabupaten Gresik seharusnya Pemerintah Kabupaten Gresik menetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang pelaksanaan program OVOP, agar pelaksanaan program OVOP di Kabupaten Gresik bisa terstruktur dan lebih baik lagi sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa pelaksanaan program desa maslahat yang berlandaskan pada konsep OVOP di Desa Jatirejo sudah diatur oleh Peraturan Bupati No 9 Tahun 2016 tentang program desa maslahat dan penetapan lokasi program desa maslahat pada nomor 400/670/HK/424.013/2014. Sehingga pelaksanaan program desa maslahat yang berlandaskan OVOP yang berada di Kabupaten Pasuruan dapat didukung oleh masyarakat.

Jadi berdasarkan temuan diatas bahwa, dalam pelaksanaan program OVOP sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Gresik seharusnya membuat peraturan tentang pelaksanaan program OVOP yang berada di Kabupaten Gresik, sehingga dalam pelaksanaan OVOP yang nanti kedepannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Gresik. Seperti temuan yang berada dilapangan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menetapkan peraturan tentang pelaksanaan program desa maslahat yang berlandaskan pada konsep OVOP di Kabupaten Pasuruan yaitu Peraturan bupati No 9 Tahun 2016 tentang pelaksanaan program desa maslahat.

Dari hasil temuan yang berada dilapangan menunjukkan bahwa, proses pelaksanaan program desa maslahat yang berada di Desa Jatirejo dengan berlandaskan pada konsep OVOP sudah berjalan dengan baik. Sebelum pelaksanaan program desa maslahat Pemerintah Kabupaten Pasuruan melakukan survey terlebih dahulu agar mengetahui potensi apa yang dapat dimanfaatkan di desa terutama di Desa Jatirejo.

Dan setelah itu melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa Jatirejo supaya dapat mengetahui pelaksanaan OVOP kedepannya. Pada proses pelaksanaan program desa maslahat yang berlandaskan pada konsep OVOP Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah membagi tugas masing- masing kepada instansi terkait yaitu bappeda sebagai

penanggung jawab program, dinas memberikan pelatihan-pelatihan kerja dan dibantu oleh tim P3DM (Percepatan Pelaksanaan Program Desa Masalahat). Didalam proses pelaksanaan yang terjadi di Desa Jatirejo terdapat teknis pelaksanaan program desa masalahat meliputi pengawasan, dan evaluasi yang diadakan setiap tiga bulan sekali untuk mengetahui perkembangan yang berada di desa.

Pada temuan dari Indah Pratiwi (2016) mengatakan bahwa, pelaksanaan program *One Village One Product* (OVOP) yang terjadi di Desa Pelaga pada proses pelaksanaan OVOP didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 yang menginstruksi kebijakan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. Sebelum melaksanakan kegiatan terlebih dahulu memberikan sosialisasi kepada masyarakat petani dengan mendatangi langsung kelompok-kelompok petani yang berada di Desa Pelaga. Sosialisasi dilakukan oleh Bidang Bina Usaha Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung bersama TTM (*Taiwan Technical Mission*). Berdasarkan hasil temuan yang berada di Desa Jatirejo dan di Desa Pelaga bahwa, mengenai proses pelaksanaan OVOP sebelum pelaksanaan dimulai perlu adanya sosialisasi dari pemerintah agar masyarakat dapat mengetahui pelaksanaan OVOP kedepannya, dan ikut berpartisipasi terhadap terselenggaranya OVOP.

Dalam bentuk pengawasan program desa masalahat yang berlandaskan pada konsep OVOP yang berada di Kabupaten Pasuruan sudah terstruktur dengan baik sebagai berikut Bappeda sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan dinas-dinas yang terkait sebagai pelaksana yang berada di desa dan memberikan pelatihan-pelatihan kerja kepada masyarakat desa yang terkena imbas dari program desa masalahat. Pada tahap pengawasan dan pertanggung jawaban program desa masalahat yang berlandaskan pada konsep OVOP tidak semuanya terlibat langsung dilapangan namun ada perwakilan dari tim P3DM dan perwakilan dari masing-masing anggota dinas yang melakukan peninjauan di desa salah satunya Desa Jatirejo sebagai penghasil kerupuk ikan.

Dari hasil temuan Amanta (2016) mengatakan bahwa, program OVOP dalam rangka pengembangan usaha batik di Kampung Wisata Batik Kauman merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM selaku pelaksana program. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Usaha dan Permodalan dibantu oleh seksi usaha dan seksi permodalan yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha dan Permodalan. Dengan hasil dari pengembangan usaha batik melalui program OVOP

yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM surakarta dapat dilihat dari berbagai kegiatannya seperti FGD (*forum group discussion*), kunjungan ke lokasi dalam upaya untuk mengembangkan kebijakan pemberdayaan UMKM. Selain itu dari sisi kelembagaan yaitu dibentuknya koperasi yang berbadan hukum, pemberian fasilitasi yang menunjang aktivitas kelembagaan seperti laptop, serta memberikan pelatihan dan pembinaan tentang manajerial koperasi.

Berdasarkan hasil temuan diatas yang terjadi bahwa, program desa maslahat yang berlandaskan pada konsep OVOP pelaksana kegiatan program desa maslahat sudah diatur oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan yaitu bappeda sebagai penanggung jawab program kegiatan, dinas memberikan pelatihan-pelatihan kerja, tim P3DM membantu pelaksanaan kegiatan yang berada di desa dan mengenai pelaporannya kepada bappeda setiap tiga bulan sekali. Dan pada temuan yang berada di Kampung Batik Kauman Surakarta melalui program OVOP tidak jauh beda yaitu kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM serta memberikan pelatihan-pelatihan, pemberian fasilitasi, dan pemberian pembinaan tentang manajerial koperasi.

Berdasarkan temuan yang berada dilapangan bahwa, evaluasi program desa maslahat yang berlandaskan pada konsep OVOP sudah baik sehingga agar mengetahui perkembangan desa maslahat yang berada di desa salah satunya di Desa Jatirejo. Tujuan dari diadakannya evaluasi agar dapat melihat persentase keberhasilan dan kegagalan yang berada di desa. Evaluasi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dilimpahkan kepada bappeda dan dilaksanakan setiap tiga bulan sekali dengan cara semua dinas yang terkait dalam pelaksanaan program desa maslahat akan dikumpulkan untuk melihat tingkat keberhasilan dan kegagalan yang berada di desa.

Dari hasil temuan yang diperoleh Indah Pratiwi (2016) yang terjadi di Desa Pelaga mengatakan bahwa, program OVOP di Desa Pelaga ditujukan pada sektor pertanian. Pemilihan Desa Pelaga telah disesuaikan dengan kondisi lingkungan desa sebagai lahan yang cocok untuk budidaya sayuran hortikultura berupa asparagus. Dalam evaluasi program OVOP yang terjadi di Desa Pelaga sudah berjalan dengan baik dilihat dari sisi konteks yang menunjukkan bahwa tujuan program OVOP sesuai dengan keadaan yang diperlukan pada Desa Pelaga dengan melihat kondisi lingkungan dan komitmen dari pemerintah serta mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan sasaran program. Dilihat dari sisi input hasil analisis menunjukkan sumber daya manusia yang ada masih memerlukan pembinaan berkelanjutan sedangkan anggaran yang diperoleh tercukupi begitu juga dengan fasilitas pendukung yang sudah memadai dan

mendukung pelaksanaan program OVOP di Desa Pelaga. Dan dari sisi proses menunjukkan bahwa pelaksanaan program dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan sesuai yang direncanakan.

Berdasarkan hasil temuan yang berada di lapangan dan di Desa Pelaga bahwa, tahap evaluasi memang perlu agar dapat mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang berada pada pelaksanaan program *One Village One Product* (OVOP). Seperti yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Pasuruan evaluasi dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh bappeda sebagai penanggung jawab pelaksanaan program desa masalah memanggil semua dinas yang terkait untuk melaporkan hasil perkembangan yang berada di desa yang nanti akan di kaji ulang untuk meningkatkan pelaksanaan program desa masalah.

Berdasarkan hasil temuan yang berada di lapangan bahwa, dampak dari adanya program desa masalah yang berlandaskan pada konsep OVOP yang berada di Desa Jatirejo bahwa, program desa masalah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan kepada Desa Jatirejo membawa hasil yang positif yaitu dapat meningkatkan perekonomian pada masyarakat desa Jatirejo dapat meningkatnya harga jual kerupuk ikan, memberikan pelatihan-pelatihan kerja. Pelatihan yang diberikan oleh dinas dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan dilaksanakan dengan baik akan tetapi tidak mengurangi nilai-nilai tradisional untuk memproduksi kerupuk ikan.

Berdasarkan hasil temuan yang berada di lapangan bahwa, masyarakat Desa Jatirejo sangat antusias dalam mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan karena pelatihan tersebut bermanfaat bagi dirinya dan terutama pada Desa Jatirejo. Program desa masalah yang berlandaskan pada konsep OVOP dinilai baik akan tetapi terdapat kendala yaitu dalam masalah pendanaan yang terkadang Pemerintah Kabupaten Pasuruan telat mengenai dana yang akan diperuntukan untuk program desa masalah sehingga pihak desa mendanai sendiri dengan menggunakan dana desa, masih adanya sebagian kecil dari masyarakat yang masih belum paham mengenai pelaksanaan program desa masalah.

Dari hasil temuan yang diperoleh Cahyani (2013) memiliki kesamaan mengenai kendala terhadap OVOP yaitu masalah kurangnya dukungan dana pemerintah pusat maupun daerah dan melemahnya koordinasi antar *stakeholders* dan kurangnya kesadaran masyarakat akan potensi yang berada di daerahnya. Pada temuan lainnya oleh Sakdiyah (2015) menegaskan bahwa, pendekatan OVOP belum mencapai seratus persen berhasil karena dari kriteria penilaian belum terpenuhi, produksi batik tulis Desa

Klampar Kecamatan Propo Pamekasan menunjukkan desain-desain batik tulis Madura seperti (carsena, sisik malaya, dan sebagainya). Dan tetap patuh kepada aturan atau pakem walaupun sebagian besar mengembangkan motif gambar dengan kreasi baru, sejalan dengan permintaan pasar yang dinamis.

Dari temuan diatas yang berada di Desa Jatirejo dan temuan oleh peneliti terdahulu bahwa program *One Village One Product* (OVOP) memang memiliki tujuan yang mulia akan tetapi terdapat kendala yang berada didalam pelaksanaannya seperti kurangnya masalah pendanaan dari pihak pemerintah, melemahnya koordinasi antara *stakeholders*, adanya masyarakat yang kurang mengetahui tentang potensi unggulan yang berada didaerahnya, dan terdapat kriteria yang belum terpenuhi sehingga pelaksanaan OVOP masih belum berjalan seratus persen di Indonesia.

F. Kesimpulan

Adanya ketidaksinergian antara Pemerintah Desa Jatirejo dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yaitu terkait dengan masalah pendanaan yang lambat dan terkadang Pemerintah Desa Jatirejo menggunakan dana desa untuk menunjang pelaksanaan program desa maslahat, masih ada sebagian kecil masyarakat yang kurang paham tentang peran masing- masing dalam program desa maslahat.

Pada pelaksanaan program desa maslahat yang berlandaskan pada konsep *One Village One Product* (OVOP) tidak semuanya berjalan seratus persen. Mengenai kendala-kendala seperti diatas agar dapat diatasi secepat mungkin karena program desa maslahat merupakan program inovasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mengentaskan desa tertinggal. Terutama dalam masalah pendanaan yang terjadi di Desa Jatirejo seharusnya Pemerintah Kabupaten Pasuruan agar bisa mengatur lebih teliti lagi untuk masalah anggaran yang diperlukan Desa Jatirejo dengan cara meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan pihak desa, sering mengontrol apa saja yang dibutuhkan masyarakat terutama dalam melaksanakan program desa maslahat yang berada di Desa Jatirejo, sehingga tidak akan terlambat pada masalah pendanaan. Dan mengenai masyarakat yang belum mengerti tentang pelaksanaan program desa maslahat sebaiknya diberikan pemahaman ulang kepada masyarakat desa agar pelaksanaan program desa maslahat dapat sepenuhnya didukung dan bisa diterima oleh masyarakat dengan cara bertahap.

Daftar Pustaka

Referensi Buku:

- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif). Yogyakarta: Erlangga.
- Moeloeng J.Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahmat, Pupu Saeful. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Equilibrium. Vol 5 Nomor 9.
- Satori Djam'an dan Komariah Aan. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Singarimbun, masri. 1995. *metode penelitian survey*. Jakarta:LP3S
- Sugiyono. 2013.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Umar, Husein. 2004. *Metode Riset Ilmu Administrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wahab, Solichin. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Internet/website:

- Asriati, Nuraini. 2015. *Pengembangan Kawasan Terpadu Mandiri dengan Pendekatan model One Village One Product (OVOP) Daerah Transmigrasi Rasau Jaya*.
[Journal.uny.ac.id/index.php/economia/article/view](http://journal.uny.ac.id/index.php/economia/article/view). Diakses 12 Maret 2017.
- Cahyani, Rusnandari *PendekatanOne Village One Product(OVOP) Untuk Meningkatkan Kreatifitas UMKM dan Kesejahteraan Masyarakat*
<http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/viewFile/249/254>.
Diakses 2 April 2017.
- Fatmawati, Khusnul. 2015 *Evaluasi Program OVOP(One Village One Product) Dalam Pemberdayaan UMKM di Kampung Wisata Batik Kauman*.
<https://eprints.uns.ac.id/17358/1/Cover.pdf>. Diakses 15 Maret 2017.
- Hartik, Andi 15 Januari 2016 *Apa Kabar Desa Maslahat*.
<http://www.timesindonesia.co.id/baca/114667/20160115/191055/apa-kabar-desa-maslahat/> .Diakses 20 April 2017.
- Junaidi, Akhmad 14 Juni 2011 *Pengembangan Produk Unggulan Jeruk Kalamansi Kota Bengkulu dengan Pendekatan OVOP*.
csmes.smeccda.com/index.php/infokop/article/view/169/159. Diakses 19 Juni 2017.
- Mawardi, Imam. 2015.*Implementasi Kebijakan Pengembangan One Village One Product (OVOP) Dalam Menguatkan Daya Saing Daerah Pada Sektor Kerajinan Rebana (Studi Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah*

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik).
<http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/965>. Diakses 12 Maret 2017.

Pratiwi, Indah *Evaluasi Pelaksanaan Program One Village One Product (OVOP) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung*.
<http://ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/article/view/23401/15344>. Diakses 10 April 2017.

Sakdiyah, Halimatus. September 2015. *Pemberdayaan Produk Lokal Melalui OVOP (One Village One Product) Dalam Meningkatkan Daya Saing Sektor Usaha Kecil Menengah (Study Kasus pada Usaha Kecil Menengah Batik Tulis Desa Klampar Kec. Proppo Pamekasan)*.
ejournal.wirajaja.a.c.id/index.php/FEB/article/view/186/0. Diakses 19 Juni 2017.

Syawaludin, Makhfud. 5 Oktober 2016 *Program Desa Maslahat Kabupaten Pasuruan Dukung Program One Village One Product*
<http://www.forumdemokrasi.com/program-desa-maslahat-kabupaten-pasuruan-dukung-program-one-village-one-product/>. Diakses 20 April 2017.

Triharini, Meirina. 2014. *Pendekatan One Village One Product (OVOP) Untuk Mengembangkan Potensi Kerajinan Daerah Studi Kasus: Kerajinan Gerabah di Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta*.
[Journals.itb.ac.id/index.php/Jvad/article/view/615](http://journals.itb.ac.id/index.php/Jvad/article/view/615). Diakses 12 Maret 2017.